



LAPORAN TAHUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perikanan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan

pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perikanan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, Januari 2024



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

IMAM SOCHADI, S. Pi. M. Si
PEMBINA / IVa
NIP. 19810227 200604 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
D. Landasan Hukum.....	7
E. Sistematika.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
B. Realisasi Anggaran.....	72
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74
BAB IV PENUTUP.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perikanan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.



Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan pada bab II pasal 3 dan 4 bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas **membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;



2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan pada bab III pasal 5 bahwa Dinas Perikanan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Sekretariat

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Sub Bagian Keuangan
- c) Sub Bagian Perencanaan

b. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :

- a) Subkoordinator Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
- b) Subkoordinator Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap dan,
- c) Subkoordinator Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap

c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan:

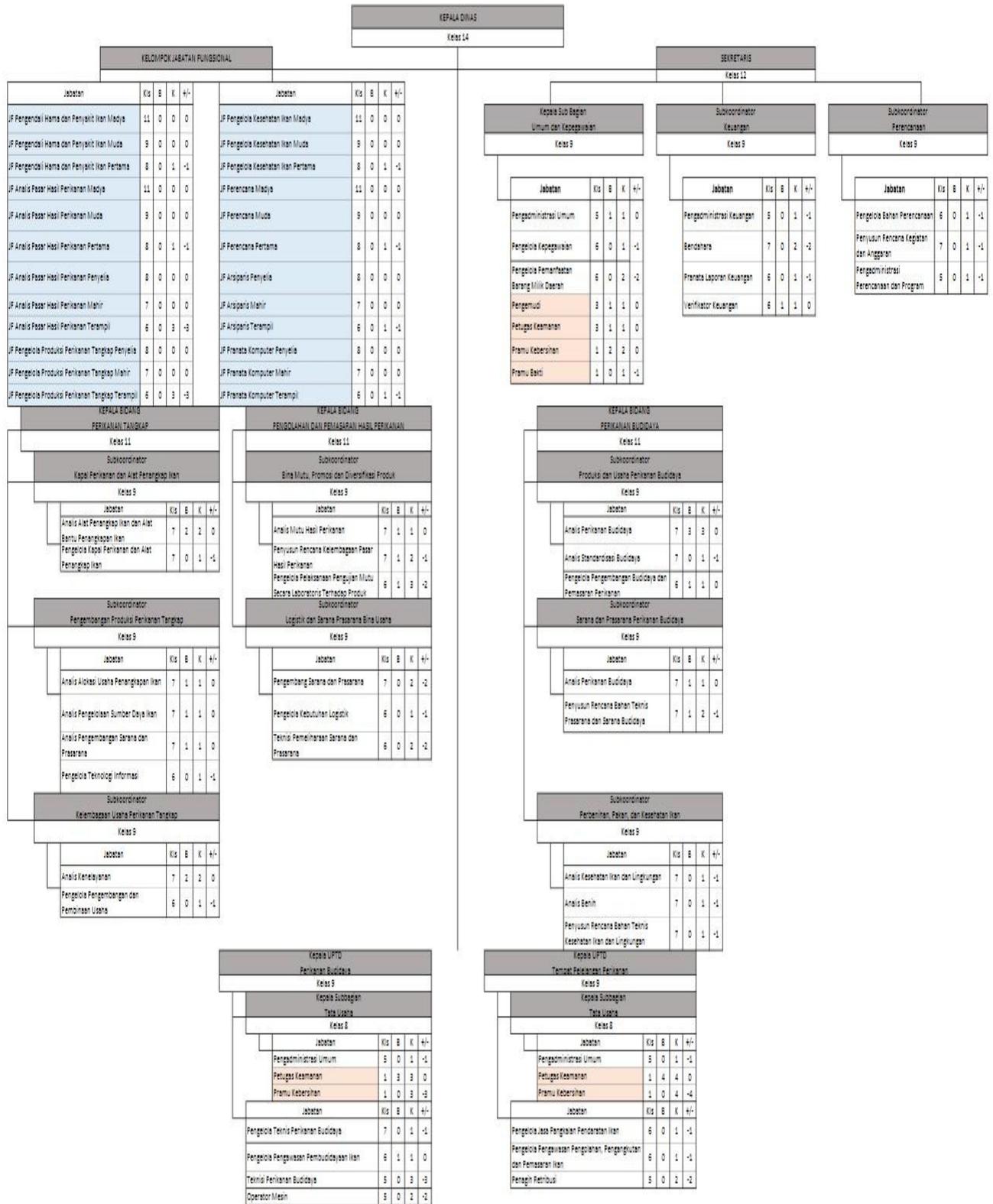
- a) Subkoordinator Bina Mutu, Promosi dan Diversifikasi Produk: dan
- b) Subkoordinator Logistik dan sarana Prasarana Bina Usaha

d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:

- a) Subkoordinator Produksi dan usaha Perikanan Budidaya;
- b) Subkoordinator Sarana dan prasarana Perikanan Budidaya; dan



- c) Subkoordinator Perbenihan, Pakan dan Kesehatan Ikan
- 2. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Daerah
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perikanan periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
2. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas dan mutu benih ikan dan ikan ukuran konsumsi hasil perikanan budidaya.
3. Kurangnya diversifikasi produk komoditas hasil perikanan dan belum optimalnya fungsi coldstorage untuk menunjang system rantai dingin perikanan.
4. Kurangnya keinginan masyarakat nelayan untuk memenuhi perizinan dan kelengkapan administrasi.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana sentra nelayan dan TPI belum memadai.
6. Masih rendahnya keinginan masyarakat untuk mengolah hasil budidaya perikanan air tawar.
7. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku utama pengolah dan pemasar hasil perikanan.



8. Terbatasnya sarana/prasarana sentra pengolahan hasil perikanan, termasuk sarana usaha pelaku utama pengolah dan pemasar hasil perikanan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.
9. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat dan akuntabel terkini dan terbaru untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan.
10. Sebagian besar potensi yang ada masuk dalam kawasan hutan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Paerikanan periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas dan mutu benih ikan dan ikan ukuran konsumsi hasil perikanan budidaya.
3. Pengoptimalan fungsi coldstorage untuk menunjang system rantai dingin perikanan.
4. Sosialisasi dan Pembinaan masyarakat nelayan untuk memenuhi perizinan dan kelengkapan administrasi.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya
6. Pembinaan terhadap pelaku utama pengolah dan pemasar hasil perikanan.
7. Penyediaan sarana dan prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
8. Penyediaan data yang akurat dan akuntabel terkini dan terbaru untuk mendukung pengambilan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal ini Nilai Tukar Nelayan, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, Nilai Konsumsi Ikan



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perikanan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembanguna



- Daerah Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 123);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 171 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189).

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan



(Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Bangka Tengah dengan potensi, keragaman dan kompleksitas

Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 s.d 2026 adalah:

Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK**



3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata.
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan mengacu pada Misi ke-2, yaitu
: **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Unggul dan Berkelanjutan melalui Penguasaan dan Pengembangan IPTEK**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (Satu) tujuan dan 1 (Satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (*)	108	108,5	109	109,5	110	110,5
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (*)	104,5	106,85	106,9	106,95	107	107,05
			Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) (*)	43	55	55,5	56	56,5	57
		Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (*)	108	108,5	109	109,5	110	110,5
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (*)	104,5	106,85	106,9	106,95	107	107,05
			Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) (*)	43	55	55,5	56	56,5	57
2	Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	86	86	86	86
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	86	86	86	86

Sumber : Renstra Dinas Perikanan periode 2021.-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Kabupaten Bangkang Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/TUJUAN	PENJELASAN		
				SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	Indeks	$NTN = It/Ib \times 100$ Keterangan : It = Indeks Tukar Ib = Indeks Belanja	DISKOMINFOSTA
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	Indeks	$NTPi = It/Ib \times 100$ Keterangan : It = Indeks Tukar Ib = Indeks Belanja	DISKOMINFOSTA
			Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) (%)	Kg/Kap/Th	TKI : KIDS + KIDA + KIMJ Keterangan : TKI = Total Konsumsi Ikan KIDS = Konsumsi Ikan dan Udang Segar KIDA = Konsumsi Ikan dan Udang Asin/Awetan KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli Dalam Bentuk Olahan/ Matang dalam Kelompok Makanan/ Minuman Jadi	DISKOMINFOSTA
	Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (%)	Indeks	$NTN = It/Ib \times 100$ Keterangan : It = Indeks Tukar Ib = Indeks Belanja	DISKOMINFOSTA
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (%)	Indeks	$NTPi = It/Ib \times 100$ Keterangan : It = Indeks Tukar Ib = Indeks Belanja	DISKOMINFOSTA
			Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th) (%)	Kg/Kap/Th	TKI : KIDS + KIDA + KIMJ Keterangan : TKI = Total Konsumsi Ikan KIDS = Konsumsi Ikan dan Udang Segar KIDA = Konsumsi Ikan dan Udang Asin/Awetan KIMJ = Konsumsi Ikan yang Dibeli Dalam Bentuk Olahan/ Matang dalam Kelompok Makanan/ Minuman Jadi	DISKOMINFOSTA

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2024



Dalam rangka merealisasikan sasaran dan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah juga telah menetapkan strategi yang akan dilakukan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas usaha kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan serta daya saing usaha berbasis hasil kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi serta kualitas pelayanan public.



B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabuapten Bangka Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	109,5
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Indeks)	106,95
		3. Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	56
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	4. Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,00
		5. Nilai Evaluasi AKIP (Nilai)	A
		6. Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa



yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Perikanan Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Bulan Januari tahun 2024 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	109,5
		2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Indeks)	106,95
		3. Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	56
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	4. Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,00
		5. Nilai Evaluasi AKIP (Nilai)	A
		6. Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perikanan :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86	Rp 5.444.620.250
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	A	Rp 20.000.000
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan SAP	Sesuai	Rp 4.427.287.250
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp10.081.000
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 30.000.000
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	Rp 210.740.000
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Pngadaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Derah	100%	Rp 30.000.000
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 452.582.000
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah	100%	Rp 263.930.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan Nelayan	Rp 6.529.861	2.003.998.002
-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1	Produksi Perikanan Tangkap	28.236.57 Ton	Rp 559.242.402



	(satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil Yang Difasilitasi dan Dibina Dalam (1) satu Daerah Kabupaten/ Kota	1.300 Orang	Rp 1.234.310.000
-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Dikelola	2 Unit	Rp 210.445.600
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp 6.250.000	Rp 3.658.134.198
-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya Ikan Kelas Madya	5 Kelompok	Rp 196.250.000
-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Budidaya Ikan (Ton), Produksi Benih (Ekor), Produksi Ikan Hias (Ekor)	1.648 Ton / 15.000.000 Ekor/ 75.000 Ekor	Rp 3.461.884.198
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan (Compliance) Kelompok Perikanan Terhadap Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku	60 %	Rp 29.780.000
-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha/ Kelompok Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya	30 Orang	Rp 29.780.000
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Konsumsi Ikan Segar/ Nilai Konsumsi Olahan Hasil Perikanan	52/4Kg/ Kap/ Tahun	Rp 2.259.494.000
-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Perizinan Usaha unit Pengolahan Ikan Yang terfasilitasi	20 Dokumen	Rp 313.970.000
-	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	40 Orang	Rp 52.785.000
-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (Satu) Daerah	12 Bulan	Rp 1.892.739.000



(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota Yang Disediakan		
----------------------------------	------------------------------------	--	--

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada bulan oktober tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Terjadi Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	109,5
		2.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (Indeks)	106,95
		3.	Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	56
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	4.	Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,00
		5.	Nilai Evaluasi AKIP (Nilai)	A
		6.	Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut



Tabel 2.7
Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan
Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86	Rp 5.236.113.448,
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	A	Rp 17.900.000
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan Keuangan Yang Sesuai Dengan SAP	Sesuai	Rp 4.383.143.448
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Rp 3.650.000
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 7.500.000
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	Rp 209.750.000,
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 401.518.000
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 212.652.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan Nelayan	Rp 6.529.861	Rp 1.944.345.552,
-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi Perikanan Tangkap	28.236.57 Ton	Rp 538.671.952
-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nelayan Kecil Yang Difasilitasi dan Dibina Dalam (1) satu Daerah Kabupaten/ Kota	1.300 Orang	Rp 1.195.694.000



-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang Dikelola	2 Unit	Rp 209.979.600
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp 6.250.000	Rp 3.504.603.000
-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya Ikan Kelas Madya	5 Kelompok	Rp 194.394.000
-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Budidaya Ikan (Ton), Produksi Benih (Ekor), Produksi Ikan Hias (Ekor)	1.648 Ton / 15.000.000 Ekor/ 75.000 Ekor	Rp 3.310.209.000
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan Pembudidaya Ikan Yang diawas	60 %	Rp 7.200.000
-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha/ Kelompok Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan nya	30 Orang	Rp 7.200.000
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Konsumsi Ikan Segar/ Nilai Konsumsi Olahan Hasil Perikanan	52/4 Kg/ Kap/ Tahun	Rp 2.144.911.000
-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Dokumen Perizinan Usaha unit Pengolahan Ikan Yang terfasilitasi	20 Dokumen	Rp 295.452.000
-	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	40 Orang	Rp 52.785.000
-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Yang Disediakan	12 Bulan	Rp 1.796.674.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (setelah perubahan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
	≤ 50%	Sangat Rendah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perikanan



Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perikanan Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109,5	126,46	115,49%	Sangat Tinggi	DISKOMINFOSTA
			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	106,95	105	98,18%	Sangat Tinggi	DISKOMINFOSTA
			Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	56	59,44	106,14%	Sangat Tinggi	DISKOMINFOSTA
2	Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	95,05	111,05%		Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
			Nilai Evaluasi AKIP	80	80,27	100,38	Sangat Tinggi	LHE LAKIP 2024
			Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	100	Sangat Baik	

Uraian penjelasan tabel :



❖ **Nilai Tukar Nelayan (NTN)**

Nilai Tukar Nelayan adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTN :

- a. **NTN > 100**, berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan nelayan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan nelayan sebelumnya.
- b. **NTN = 100**, berarti nelayan mengalami impas/break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan tidak mengalami perubahan.
- c. **NTN < 100**, berarti nelayan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan nelayan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan nelayan periode sebelumnya.

NTN dihitung berdasarkan rata-rata total pendapatan keluarga nelayan dibandingkan dengan total pengeluaran keluarga nelayan. Nilai penerimaan nelayan rata-rata sebesar Rp 8.170.833,- per bulan, dan pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar Rp 6.461.451,-per bulan. Besarnya nilai tukar nelayan Bangka Tengah pada pada triwulan ke-1, 2, 3 dan 4 tahun 2024 masing-masing sebesar 119,57; 132,37; 135,03 dan 118,85. Berdasarkan nilai-nilai tersebut didapatkan nilai tukar nelayan (NTN) Bangka Tengah tahun 2024 sebesar



126,46. NTN Kabupaten Bangka Tengah berada diatas nilai 100 yang mengindikasikan bahwa kegiatan para nelayan dalam melaut mampu menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi dan biaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan. NTN dipengaruhi nilai produksi hasil tangkapan ikan yang bergantung pada musim, dan pengeluaran utama seperti biaya kebutuhan pokok, biaya melaut, biaya Pendidikan, biaya listrik rumah tangga, biaya transportasi, biaya kesehatan dan sandang. NTN juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat (konsumen). Dari hasil evaluasi didapatkan beberapa faktor yang mendukung tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat nelayan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar, menerapkan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan yang baik salah satunya dengan bantuan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan), yaitu suatu aplikasi penentuan wilayah potensial penangkapan/daerah potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh (Inderaja) yang mulai diterapkan pada pertengahan tahun 2019, dengan adanya tujuan daerah penangkapan ikan yang terarah maka akan meningkatkan produksi hasil nelayan dan menghemat biaya penangkapan.



3. Jumlah produksi dan harga jual ikan produksi tangkapan di tingkat nelayan relatif stabil.

Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 secara rinci per Triwulan diuraikan di bawah ini.

- a. Triwulan I (Januari – Maret) dan

Hasil analisis NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 pada Triwulan I sebesar 119,57. Nilai yang diterima nelayan pada triwulan I sebesar Rp7.726.041.66 dibandingkan Nilai yang dibayar nelayan sebesar Rp6.461.288. NTN triwulan I tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan NTN pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 110,57, serta melampaui capaian NTN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun yang sama pada Triwulan I sebesar 110,57

- b. Triwulan II (April -Juni)

Hasil analisis NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 pada Triwulan II sebesar 132,37. Nilai yang diterima nelayan pada triwulan II sebesar Rp8.553.125. NTN triwulan II tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan NTN pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 105,12, serta melampaui capaian NTN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun yang sama pada Triwulan II sebesar 108,44.

- c. Triwulan III (Juli – September)

Hasil analisis NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 pada Triwulan III sebesar 135,03. Nilai yang diterima nelayan pada triwulan III sebesar Rp8.725.000. NTN triwulan III tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan NTN pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 107,64, serta melampaui capaian NTN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ditahun yang sama pada Triwulan I II

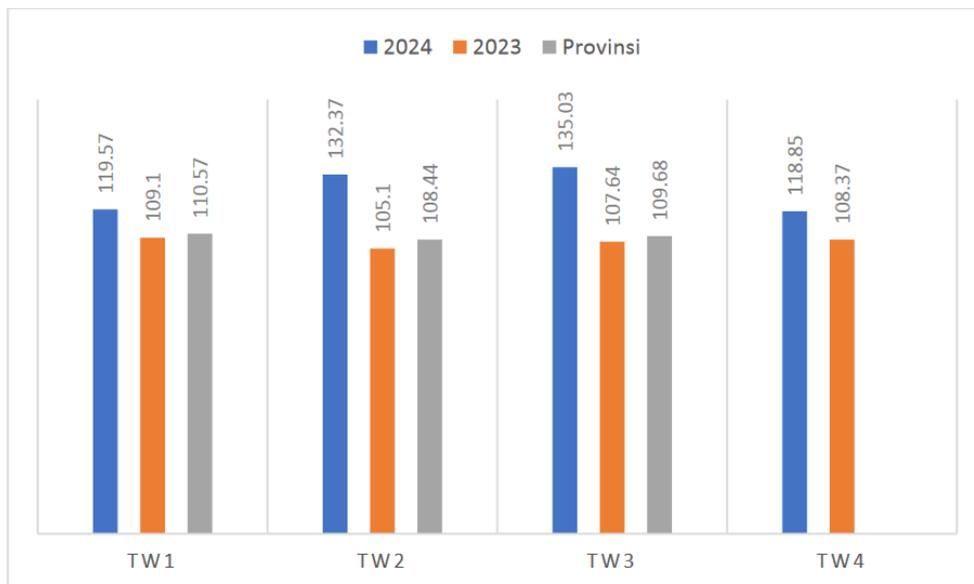


sebesar 109,68.

d. Triwulan IV (Oktober – Desember)

Hasil analisis NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 pada Triwulan IV sebesar 118,85. Nilai yang diterima nelayan pada triwulan IV sebesar Rp7,679,167. NTN triwulan IV tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan NTN pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 108,37.

Capaian NTN Kabupaten Bangka Tengah secara umum mencapai target NTN nasional sebesar 107-108. Hal ini mengindikasikan, bahwa kesejahteraan nelayan di Kabupaten Bangka Tengah adalah baik. Dukungan program pemerintah daerah maupun pemerintah desa ditingkat local berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga nelayan. Berikut tersaji Grafik perbandingan NTN triwulan I – triwulan IV Tahun 2024 dan tahun 2023 (**Gambar 3.1**).



(Gambar 3.1 Grafik perbandingan NTN triwulan I – triwulan IV Tahun 2023,2024 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nilai NTN Kabupaten Bangka Tengah pada Triwulan IV diatas 100, mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan nelayan mampu



menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi dan biaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan. NTN dipengaruhi nilai produksi hasil tangkapan ikan yang bergantung pada musim, dan pengeluaran utama seperti biaya kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pemeliharaan rutin rumah tangga, Pendidikan, informasi, komunikasi, transportasi, perawatan pribadi, rekreasi, sewa, barang modal, transportasi dan upah buruh

❖ **Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)**

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan. Secara umum ada 3 (tiga) macam pengertian NTPi :

- **NTPi > 100**, berarti pembudidaya ikan mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pembudidaya ikan naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan sebelumnya.
- **NTPi = 100**, berarti pembudidaya ikan mengalami impas/break even. Kenaikan atau penurunan harga barang produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan tidak mengalami perubahan.
- **NTPi < 100**, berarti pembudidaya ikan mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat

kesejahteraan pembudidaya ikan periode sebelumnya.

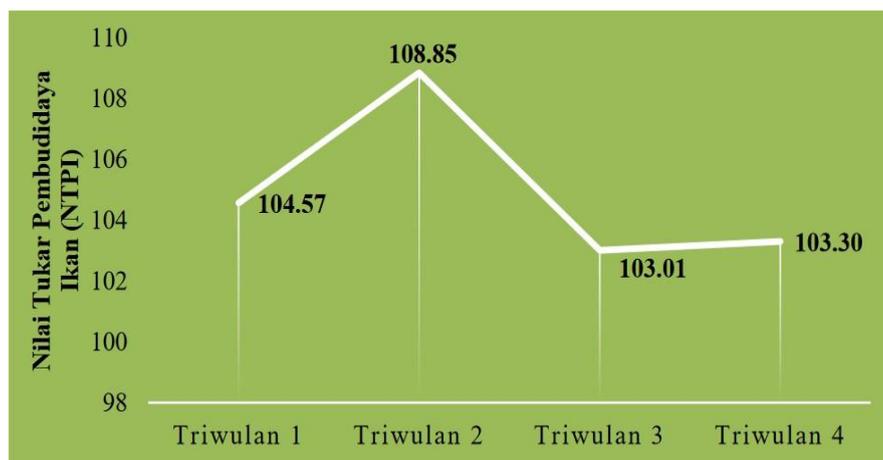
NTPi dihitung berdasarkan rata-rata total penerimaan keluarga pembudidaya ikan dibandingkan dengan total pengeluaran keluarga pembudidaya ikan dalam satu bulan.

a. Analisis NTPi Per Triwulan di Kabupaten Bangka Tengah

Analisis NTPi Kabupaten Bangka Tengah terbagi atas 4 nilai capaian per triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024.

Tabel 3.3. Capaian NTPi Kabupaten Bangka Tengah Per Triwulan

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	NTPi Rata-Rata
104.57	108.85	103.01	103.30	104.93



Gambar 3.2. Grafik Tren Capaian NTPi Per Triwulan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dinamika Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Daerah (NTPID) di Kabupaten Bangka Tengah selama empat triwulan pada tahun 2024 mencerminkan kondisi ekonomi sektor perikanan budidaya di Kabupaten ini. Pada triwulan pertama, nilai NTPID tercatat sebesar 104,57, menunjukkan kondisi ekonomi yang cukup menguntungkan bagi pembudidaya ikan, dengan nilai berada di atas indeks dasar



(100). Pada triwulan kedua, NTPID mengalami peningkatan signifikan mencapai 108,85, yang merupakan puncak tertinggi selama tahun 2024. Hal ini mengindikasikan periode dengan tingkat keuntungan ekonomi yang optimal, kemungkinan didorong oleh faktor-faktor seperti tingginya harga jual hasil budidaya, peningkatan permintaan pasar, atau efisiensi biaya produksi. Namun, pada triwulan ketiga, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 103,01, yang dapat diduga disebabkan karena fluktuasi harga komoditas, meningkatnya biaya produksi, atau menurunnya daya serap pasar. Pada triwulan keempat, NTPID menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 103,3, yang menandakan adanya perbaikan, meskipun belum mencapai tingkat optimal seperti pada triwulan kedua.

Perhitungan pendapatan (It) dan pengeluaran (Ib) pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah menggambarkan seberapa besar nilai tukar pembudidaya ikan berdasarkan komponen konsumsi rumah tangga (KRT) dan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).



Tabel 3.3 Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Pembudidaya Ikan Tahun 2024

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	104.57	108.85	103.01	103.30
Komponen	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1. Jumlah yang dibayar (Ib)	5,011,589	5,199,485	4,938,831	4,952,620
a. KRT	2,028,637	2,104,695	1,999,185	2,004,767
- Makanan, Minuman dan Tembakau (Kebutuhan Pokok di Dalam Rumah Tangga)	966,167	1,002,391	952,140	954,798
- Pakaian dan Alas Kaki (Pembelian Pakaian Saat Hari Raya, Saat Masuk Sekolah Atau Saat Pakaian Rusak)	175,116	181,681	172,574	173,055
- Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga (Gas/Minyak Tanah)	154,371	160,159	152,130	152,554
- Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (Perkakas, Sapu Lantai, Kasur dsb)	124,425	129,090	122,619	122,961
- Kesehatan	22,174	23,006	21,852	21,913
- Transportasi	182,985	189,846	180,328	180,832
- Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Lainnya	25,886	26,856	25,510	25,581
- Rekreasi, Olahraga dan Budaya	28,682	29,758	28,266	28,345
- Pendidikan	290,302	301,186	286,087	286,886
- Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran (Luar Rumah Tangga)	45,882	47,602	45,216	45,342
- Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Termasuk Hutang dsb)	12,647	13,121	12,463	12,498
b. BPPBM	2,982,952	3,094,790	2,939,646	2,947,853
- Bibit/Benih (Pembesaran)	749,110	777,196	738,235	740,296
- Pupuk, Obat-Obatan dan Pakan Ikan	1,781,041	1,847,817	1,755,184	1,760,084
- Biaya Perbaikan dan Perawatan Kolam	45,225	46,921	44,569	44,693
- Biaya Transportasi dan BBM (Sewa/Jasa)	56,411	58,526	55,592	55,747
- Belanja Modal (Waring, Serok, dsb)	122,049	126,625	120,277	120,613
- Upah Buruh/Pekerja	167,940	174,236	165,501	165,963
- Biaya Lainnya yang Berkaitan dengan Kegiatan Produksi	61,176	63,469	60,288	60,456
2. Jumlah yang diterima (It)	5,240,858	5,659,770	5,087,356	5,116,092
- Hasil Kegiatan Budidaya	2,756,443	2,887,252	2,641,066	2,665,879
- Non Perikanan	2,484,415	2,772,518	2,446,290	2,450,213

Keterangan:

KRT :Konsumsi Rumah Tangga

BPPBM :Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal

Berdasarkan tabel diatas KRT atau pengeluaran rumah tangga pembudidaya ikan terbesar adalah biaya kebutuhan pokok di dalam rumah tangga seperti Makanan, Minuman dan Tembakau. Pengeluaran BPPBM atau biaya produksi dan penambahan modal dari pembudidaya tertinggi adalah komponen pupuk, obat-obatan dan pakan ikan serta benih ikan (untuk kegiatan pembesaran). Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dari sisi pengeluaran, maka



hampir seluruh presentase komponen pengeluaran meningkat namun komponen produksi budidaya saat ini (2024) dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah masih dikategorikan sejahtera.

❖ Nilai Konsumsi Ikan Kabupaten dan Kecamatan

Hasil Survei Nilai dan hasil Analisis Nilai Konsumsi Ikan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024, adalah sebesar 59,44 kg/kapita/tahun atau sebesar 4,95 Kg/kapita/Bulan atau sebesar 1,24 kg/kapita/Minggu atau sebesar 0,17 Kg/kapita/hari atau 165 gram/kapita/Hari. Nilai Konsumsi Ikan daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Nilai Konsumsi Ikan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 disajikan pada table berikut

No	Kecamatan	Nilai Konsumsi Ikan (/Kg/Kapita)
1	Lubuk Besar	67,15
2	Koba	61,41
3	Simpang Katis	54,66
4	Sungai Selan	54,60
5	Pangkalan Baru	64,79
6	Namang	53,47
Rata-Rata	Kab. Bangka Tengah	59,44

Tabel 3.3 Nilai Konsumsi Ikan tingkat Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024



Gambar 3.3. Nilai Konsumsi Ikan daerah Kabupaten Bangka Tengah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024

Nilai konsumsi ikan segar dan ikan olahan di setiap triwulan, disetiap kecamatan Kabupaten Bangka Tengah sepanjang tahun 2024, disajikan pada tabel 3.5. Trend nilai konsumsi ikan setiap triwulan, disetiap kecamatan Kabupaten Bangka Tengah selama tahun 2024, disajikan pada tabel 3.5.

No	Kecamatan	Nilai Konsumsi Ikan (/Kg/Kapita)			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	Lubuk Besar	70,25	63,45	59,37	75,51
2	Koba	68,26	60,06	51,15	66,16
3	Simpang Katis	62,05	47,61	53,47	55,49
4	Sungai Selan	53,90	46,36	56,86	61,30
5	Pangkalan Baru	72,04	63,83	54,61	68,68
6	Namang	58,55	49,76	53,14	52,42
Rata-rata per Triwulan		64,17	55,18	54,77	63,26

Sumber : Data Primer tahun 2024 (diolah)

Tabel 3.4. Trend nilai konsumsi ikan setiap triwulan

Hasil kajian Nilai Konsumsi Ikan di kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 menunjukkan bahwa, dari enam kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Lubuk Besar memiliki nilai konsumsi ikan terbesar, yakni sebesar 67,15 gram/kapita/tahun. Nilai konsumsi ikan terbesar selanjutnya ada di kecamatan Pangkalan Baru sebesar 64,79 kg/kapita/tahun. Nilai Konsumsi Ikan di kecamatan Koba sebesar 61,41 kg/kapita/tahun. Nilai Konsumsi Ikan di kecamatan Simpang Katis sebesar 54,66 kg/kapita/tahun, Nilai Konsumsi Ikan di

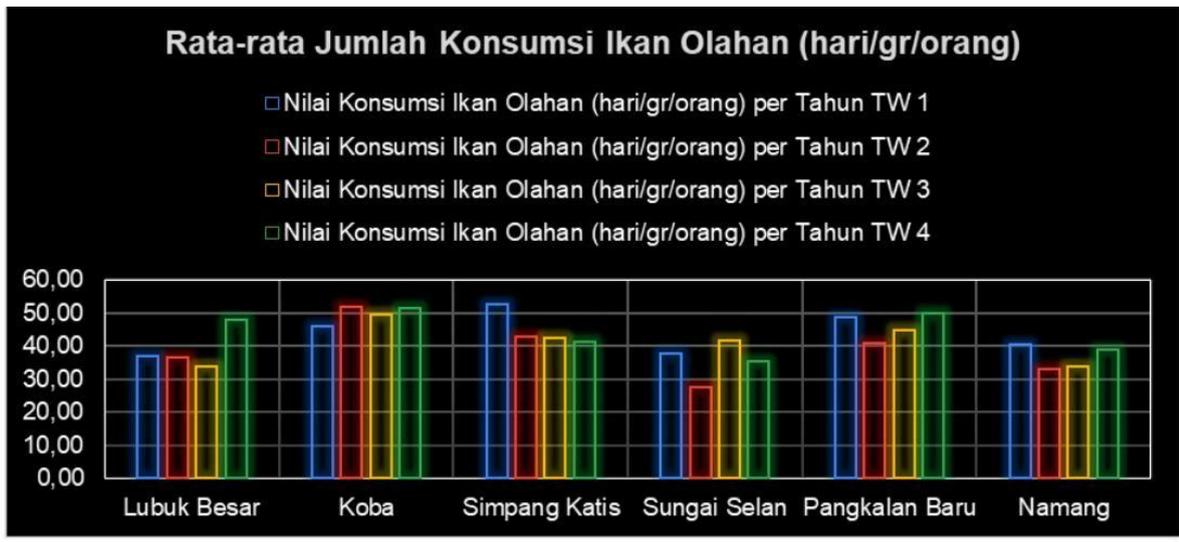
kecamatan Sungai Selan sebesar 54,60 kg/kapita/tahun. Nilai Konsumsi Ikan di kecamatan Namang sebesar 53,42 kg/kapita/tahun.

Dari hasil penghitungan nilai konsumsi ikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024, didapat juga nilai konsumsi setiap triwulan. Triwulan 1 (TW 1), yakni bulan Januari-Maret, Triwulan 2 (TW 2) yakni bulan April-Juni, Triwulan 3 (TW 3) yakni bulan Juli-September dan Triwulan 4 (TW 4) yakni bulan Oktober-Desember. Secara umum, hasil perhitungan menunjukkan bahwa pola konsumsi ikan segar masyarakat Bangka Tengah menurun signifikan di TW 2 dan TW 3, namun masih cukup tinggi pada TW 1 dan TW 4. Berbeda dengan pola konsumsi ikan olahan dan ikan semi olahan, Dimana masyarakat Bangka Tengah lebih banyak mengkonsumsi ikan olahan dan semi olahan cenderung stagnan di setiap TW. Gambar 12 menunjukkan pola nilai konsumsi ikan segar setiap TW di setiap kecamatan. Gambar 13 menunjukkan pola nilai konsumsi ikan olahan setiap TW di setiap kecamatan. Dan, gambar 14 menunjukkan pola nilai konsumsi ikan semi olahan setiap TW di setiap kecamatan.



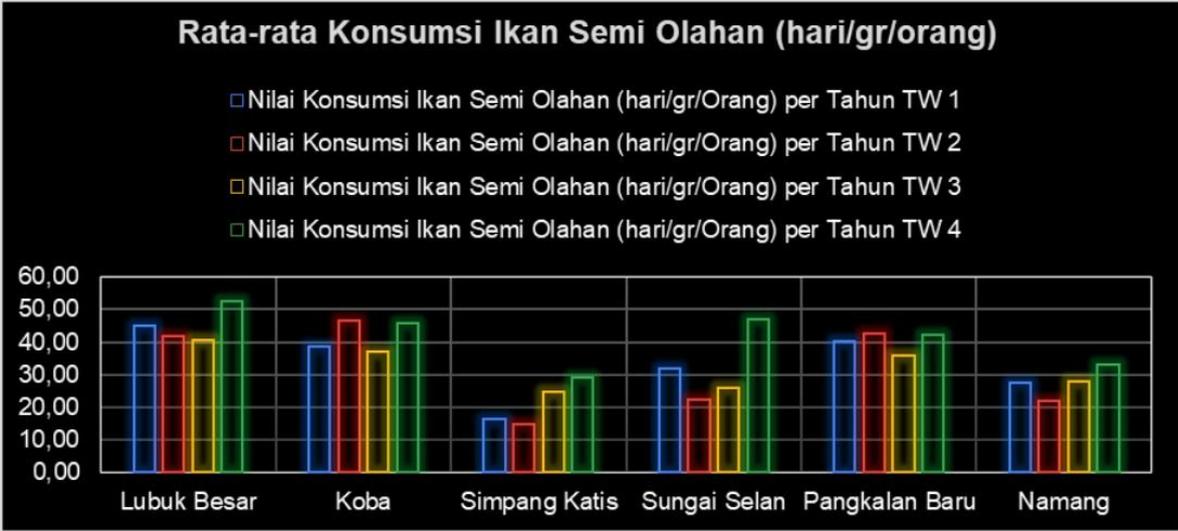
Gambar 3.4. Pola nilai konsumsi ikan segar setiap TW di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024.

Sumber : data primer 2024 (diolah)



Gambar 3.5. Pola nilai konsumsi ikan olahan setiap TW di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024.

Sumber : data primer 2024 (diolah)

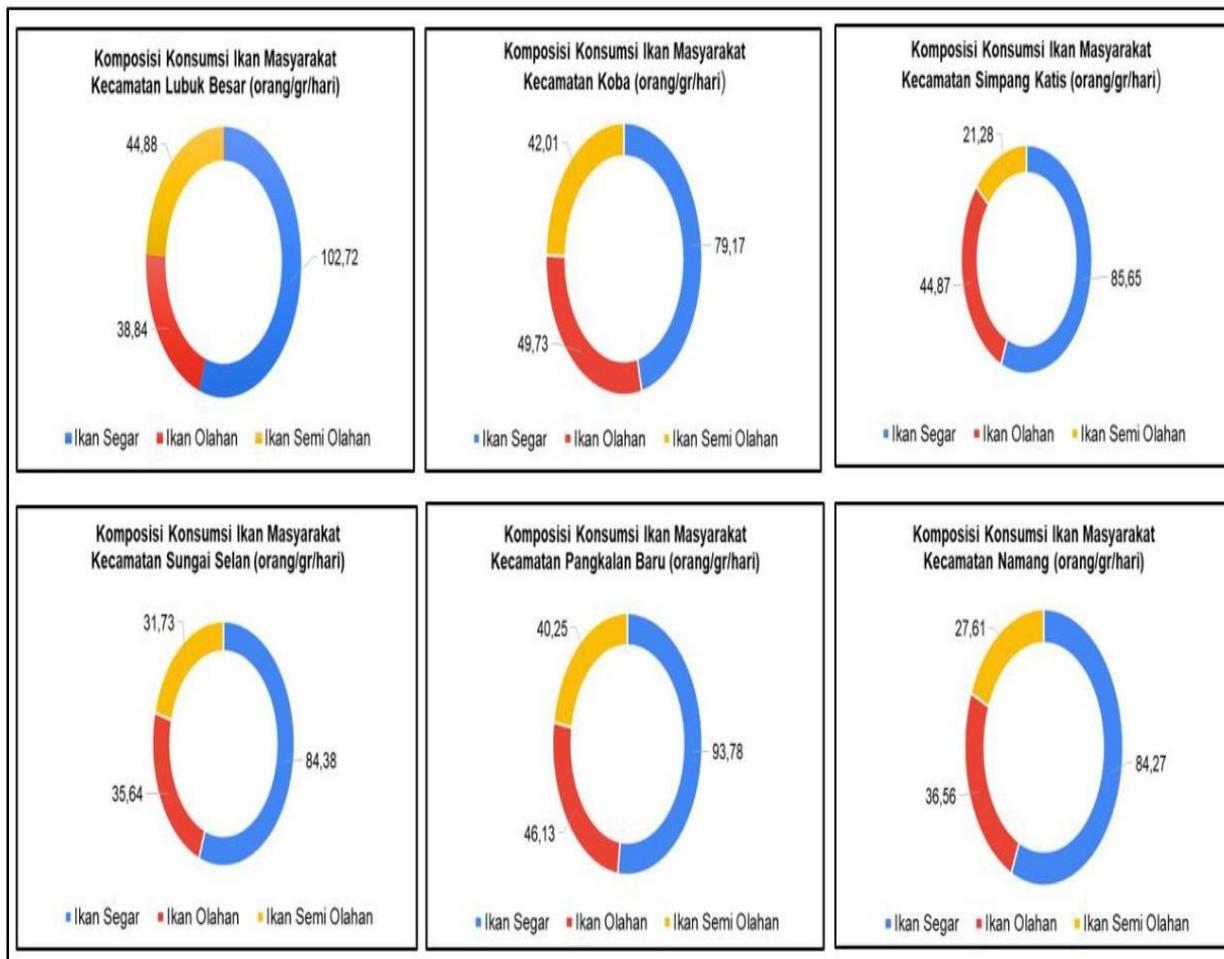


Gambar 3.6. Pola nilai konsumsi ikan semi olahan setiap TW di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024.

Sumber : data primer 2024 (diolah)

Hasil perhitungan komposisi konsumsi ikan oleh masyarakat Bangka Tengah di tahun 2024 ini menunjukkan bahwa, masyarakat kecamatan Lubuk Besar paling banyak mengkonsumsi ikan segar. Sedangkan yang paling sedikit mengkonsumsi ikan segar adalah masyarakat kecamatan Koba. Konsumsi ikan dalam bentuk olahan, paling banyak di konsumsi oleh masyarakat kecamatan

Koba. Sedangkan konsumsi ikan dalam bentuk olahan, paling sedikit adalah masyarakat kecamatan Sungai Selan. Konsumsi ikan dalam bentuk semi olahan, paling banyak di konsumsi oleh masyarakat kecamatan Lubuk Besar. Sedangkan konsumsi ikan dalam bentuk semi olahan, paling sedikit adalah masyarakat kecamatan Simpang Katis. Gambar 15 menunjukkan komposisi konsumsi ikan oleh masyarakat Bangka Tengah di tahun 2024.



Gambar 3.7. Komposisi konsumsi ikan oleh masyarakat Bangka Tengah di setiap kecamatan tahun 2024

Konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi standard FAO (Food and Agriculture Organization) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yakni 31,40 kg/kapita/tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa, tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat Bangka Tengah, sudah memenuhi target rata-rata konsumsi ikan



nasional yang sebesar 59,53. Secara persepsi Ikan yang paling digemari untuk di konsumsi oleh masyarakat Bangka Tengah adalah ikan dalam bentuk segar. Dan, Ikan laut dalam bentuk segar lebih disukai masyarakat dari pada ikan segar air tawar.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan dilakukannya indeks kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pada Dinas Perikanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Dinas Perikanan. Pada tahun 2024 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan ditargetkan sebesar 86,00 dan terealisasi 95,50 atau 111,05%.

Adapun hasil pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Perikanan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

❖ Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwakilan setiap bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada



di Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

❖ **Metode Pengumpulan Data**

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner digital (*online*) dan manual (*offline*) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap



spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

❖ **Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan/atau dibantu oleh petugas pelayanan. Hasil survey tersebut dikumpulkan ke petugas pelayanan untuk selanjutnya direkap pada Bagian Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.



❖ Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Waktu Pelaksanaan SKM

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2024
2.	Pengumpulan Data	Januari s.d Desember 2024
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juni s.d Desember 2024
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Desember 2024

❖ Penentuan Jumlah Responden

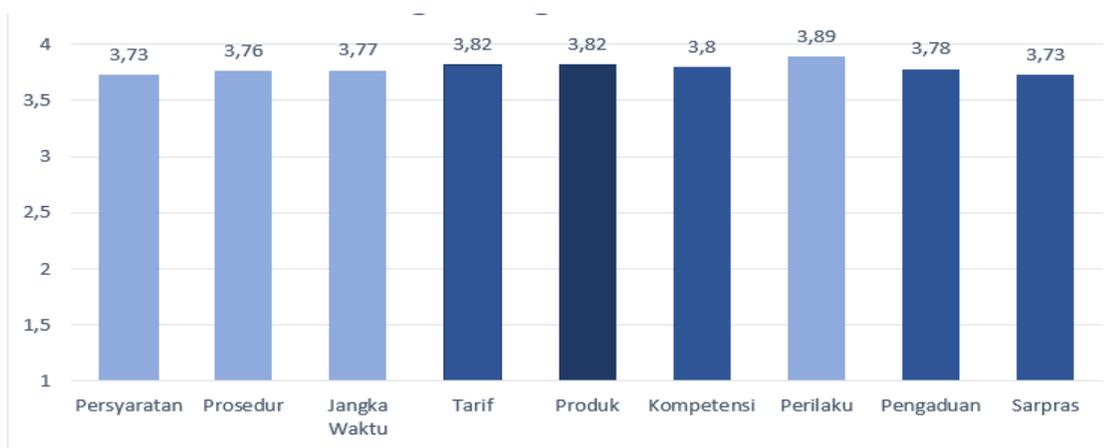
Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi Penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu Satu tahun adalah sebanyak 320 Pada Semester 1 dan 361 pada semester 2 orang yang terdiri dari beberapa pelayanan bidang, seperti Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Perikanan Budidaya, dan Bidang Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 175 orang.

❖ Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit layanan dan Perunsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	93,14	94,14	94,42	95,57	95,57	95,14	97,28	94,71	93,14
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,746 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 3.6 Detail Nilai SKM Per Unsur Semester I



Gambar 3.8 Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester I

❖ Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Semester I

Berdasarkan hasil pengolahan data semester I, dapat diketahui bahwa :

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

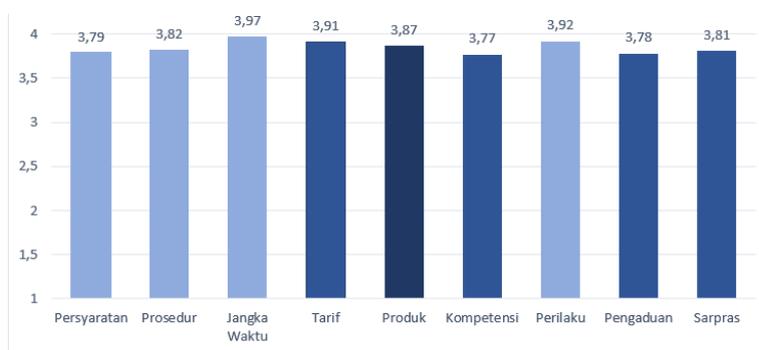
1. Persyaratan Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,73. Selanjutnya Sarana Prasarana Layanan yang mendapatkan nilai 3,73 adalah nilai terendah kedua. Serta Prosedur Pelayanan dengan nilai sebesar 3,76 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Petugas



Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 3,89 dari unsur layanan, dan Produk serta Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi berturut-turut berikutnya yaitu 3,82 dan 3,82.

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur		94,87	95,63	99,37	97,92	96,88	94,40	98,19	94,66	95,36
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan		96,27 (A atau Sangat Baik)								

Tabel 3.7 Detail Nilai SKM Per Unsur Semester II



Gambar 3.9 Grafik Nilai SKM Per Unsur Semester II

❖ Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Semester II

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Kompetensi mendapatkan nilai terendah yaitu 3,77. Selanjutnya Pengaduan yang mendapatkan nilai 3,78 adalah nilai terendah kedua. Serta Persyaratan Pelayanan dengan nilai sebesar 3,79 termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Jangka Waktu Pelayanan mendapatkan nilai tertinggi 3,97 dari unsur layanan, dan Perilaku serta Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi berturut-turut berikutnya yaitu 3,92 dan 3,91.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik



maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut

perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu			
			I	II	III	IV
1	Prosedure Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√	√	√
2	Jangka Waktu Layanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap Jangka waktu pelayanan	√	√	√	√
3	Produk Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk pelayanan	√	√	√	√

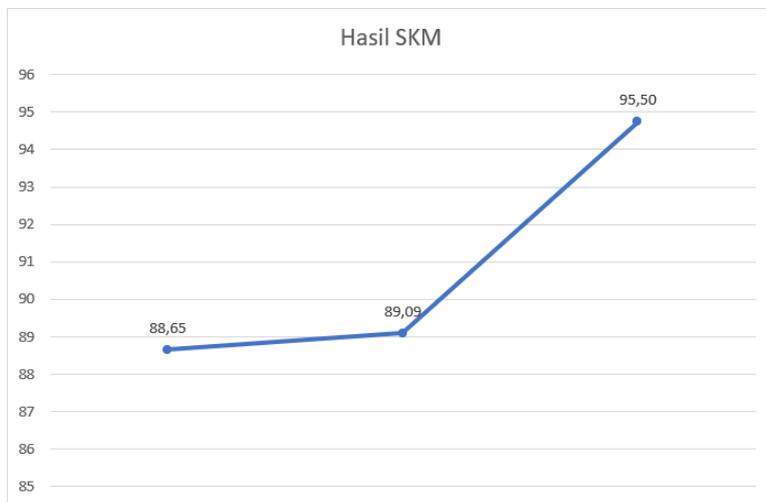
Tabel 3.8 Waktu Pelaksanaan SKM

❖ Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan



penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat melalui grafik berikut :



Gambar 3.10

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah



Formulir Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

CONTOH KUESIONER

**KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Tanggal : □□ / □□ / □□□□	Waktu : <input type="checkbox"/> 08.00 – 12.00* <input type="checkbox"/> 13.00 – 17.00*
Jenis Layanan yang diterima :	
Profil Responden	
Jenis Kelamin : <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P	Usia : □□ Tahun
Pendidikan :	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3
Pekerjaan :	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> TNI <input type="checkbox"/> Polri <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> Wirausaha
	<input type="checkbox"/> Lainnya :

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

<p>1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak sesuai2. Kurang sesuai3. Sesuai4. Sangat sesuai	<p>6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak kompeten2. Kurang kompeten3. Kompeten4. Sangat kompeten
<p>2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak mudah2. Kurang mudah3. Mudah4. Sangat mudah	<p>7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak sopan dan ramah2. Kurang sopan dan ramah3. Sopan dan ramah4. Sangat sopan dan ramah
<p>3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak cepat2. Kurang cepat3. Cepat4. Sangat cepat	<p>8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana</p> <ol style="list-style-type: none">1. Buruk2. Cukup3. Baik4. Sangat Baik
<p>4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sangat mahal2. Cukup mahal3. Murah4. Gratis	<p>9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada2. Ada tetapi tidak berfungsi3. Berfungsi kurang maksimal4. Dikelola dengan baik
<p>5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tidak sesuai2. Kurang sesuai3. Sesuai4. Sangat sesuai	<p>SARAN DAN MASUKAN :</p>



Beberapa faktor pendukung tercapainya bahkan melampaui target yang ditetapkan, diantaranya :

1. Komitmen aparaturnya Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku perikanan.
2. Penyediaan SDM, administrasi, sarana dan prasarana untuk mendukung aktifitas pelayanan perizinan, diantaranya ruangan pelayanan perizinan, laptop, printer, SOP pelayanan perizinan dan aparaturnya khusus melayani perizinan.
3. Sosialisasi yang optimal kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan tentang pentingnya memiliki dokumen perizinan untuk setiap unit usaha perikanan.

c. Nilai Evaluasi AKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang



diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyampaian LKIP bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bangka Tengah. Kategori penilaian SAKIP adalah sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar



6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Tabel 3.9

Pada tahun 2024, berdasarkan penilaian dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, nilai evaluasi SAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah memperoleh nilai sebesar **80,27** atau predikat **A** dari yang ditargetkan A (>80-90). Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaiannya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan hasil yang **memuaskan**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10. Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,72
2	Pengukuran Kinerja	30	23,94
3	Pelaporan Kinerja	15	12,11
4	Evaluasi Internal	25	19,50
Hasil Evaluasi		100	80,27

Beberapa faktor pendukung tercapainya target yang ditetapkan, diantaranya :

1. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan



- Kabupaten Bangka Tengah untuk merealisasikan setiap target indikator kinerja utama, indikator program dan indikator kegiatan.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan untuk menganggarkan program dan kegiatan untuk merealisasikan target kinerja.
 3. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk komitmen dan konsisten terhadap dokumen perencanaan (renstra dan renja) yang telah ditetapkan.

E. Laporan Keuangan Dinas Perikanan Sesuai Dengan SAP

Pada tahun 2023, nilai evaluasi Laporan Keuangan (LK) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah telah **sesuai** dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini turut mendukung predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun - tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi Kinerja Tahun- tahun sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Satuan	2020		2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks	107	108	108	116,04	108,5	110,6	101,93	109	107,57	98,69	109,5	126,46	115,49
2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Indeks	104	106,8	104,5	105,57	106,85	106,82	99,97	106,9	108,06	101,09	106,95	105	98,18
3	Nilai Konsumsi Ikan (NKI)	Kg/Kap/Tahun	42,5	54,95	43	61,4	55	63,07	114,67	55,5	67,41	121,46	56	59,44	106,14
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85,09	86	86,35	86	86,65	100,75	86	89,123	103,63	86	95,50	111,05%
5	Nilai Evaluasi AKIP	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	Laporan Keuangan Dinas Perikanan	Kategori	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Tujuan :Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan							
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	109	107,57	98,69	109,5	126,46	115,49
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	106,9	108,06	101,09	106,95	105	98,18
		Nilai Konsumsi Ikan(Kg/Kap/Th)	55,5	67,41	121,46%	56	59,44	106,14
	Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik							
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	89,123	103,63	86	95,50	111,05%
		Nilai Evaluasi AKIP	A	A	100%	A	A	100%
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	100%	Sesuai	Sesuai	100%

NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 meningkat cukup signifikan dibandingkan NTN Tahun 2023. NTN rata-rata tahun 2024 sebesar 126,45, dibandingkan NTN rata-rata tahun 2023 sebesar 107,57 atau naik sebesar 18,88 poin. NTN Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 juga melampaui NTN rata-rata Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 109,56. Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN lebih dari 100, yakni menggambarkan harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Artinya pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. NTN dipengaruhi nilai produksi hasil tangkapan ikan yang bergantung pada musim, dan pengeluaran utama



seperti biaya kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pemeliharaan rutin rumah tangga, Pendidikan, informasi, komunikasi, transportasi, perawatan pribadi, rekreasi, sewa, barang modal, transportasi dan upah buruh.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah 105, angka NTPi ini turun bila dibandingkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 108,06. nilai rata-rata secara umum di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 sebesar 104,93 (dibulatkan menjadi 105) atau menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 108,06 (dibulatkan menjadi 108). Nilai tukar pembudidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah masih diatas 100, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan mampu menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi/kebutuhan atau pengeluaran rumah tangganya.

Nilai konsumsi ikan (NKI) Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 11,83%, jika bandingkan dengan NKI tahun 2023. Hasil Survei Nilai dan hasil Analisis Nilai Konsumsi Ikan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024, adalah sebesar 59,44 kg/kapita/tahun atau sebesar 4,95 Kg/kapita/Bulan atau sebesar 1,24 kg/kapita/Minggu atau sebesar 0,17 Kg/kapita/hari atau 165 gram/kapita/Hari. Meskipun nilai konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2024 ini, masih memenuhi standard FAO (Food and Agriculture Organization) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yakni NKI/AKI sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Peningkatan nilai NKI di Bangka tengah di tahun 2023 mengindikasikan bahwa, masyarakat mulai menyadari pentingnya mengonsumsi ikan, selain adanya recovery ekonomi masyarakat, juga disebabkan oleh terjaganya kondisi pasokan ikan di masyarakat, yang di sumbangkan dari produksi perikanan tangkap laut, tangkap perairan umum dan hasil budidaya. Namun di tahun 2024, perekonomian Masyarakat kembali



menurun imbas dari goncangan pertimahan nasional dan provinsi. Akibatnya, nilai konsumsi ikan masyarakat Bangka Tengah mengalami penurunan cukup signifikan dalam di tahun 2024

Indeks Kepuasan masyarakat pada Dinas Perikanan kabupaten bangka tengah pada Tahun 2023 realisasi sebesar 89,12 dengan capaian 103,63 sedangkan ditahun 2024 realisasi sebesar 95,50 dengan capaian 111,05 terjadi peningkatan nilai indek kepuasan masyarakat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 6,62. Pada Nilai SAKIP Dinas Perikanan tahun 2024 target 80 realisasi 80,27 dengan capaian 100,34. Diharapkan di Tahun 2024 ini Dinas Perikanan Kabupaten tetap mempertahankan Predikat A. Pada Laporan keuangan pada Dinas Perikanan Tahun 2023 maupun Tahun 2024 sesuai dengan SAP.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.13

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	Tujuan :Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan				
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	126,46	110,5	114,44
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	107,05	98,09
		Nilai Konsumsi Ikan(Kg/Kap/Th)	59,44	57	104,28
2	Tujuan :Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik				



	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,50	86	111,05
		Nilai Evaluasi AKIP	80,27	80	100,33
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Uraian penjelasan tabel :

Nilai Tukar Nelayan, Nilai Konsumsi Ikan, Indeks Kepuasan masyarakat, Nilai SAKIP Dinas perikanan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP di Kabupaten Bangka Tengah jika dibandingkan dengan akhir periode Tahun 2026 tingkat kemajuannya sudah melebihi target Sedangkan untuk Nilai Tukar pembudidaya Ikan untuk tingkat kemajuan belum mencapai target akhir tahun 2026.



Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar /Realisasi Level Nasional	% Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$	
	Tujuan Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan					
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	126,46	* 101,62	124,44	*Realisasi Triwulan II
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	105	* 101,35	103,6	*Realisasi Triwulan II
		Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)	59,44	*57,61	103,18	Nilai Konsumsi Ikan Tahun 2023

Uraian Tabel :

- Pada Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) realisasi pada Tahun 2024 didinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 126,46 sedangkan dilevel nasional 101,62 (realisasi Triwulan II). untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada level Kabupaten lebih tinggi dibandingkan pada Level nasional, dengan capaian 124,44.
- Pada indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) realisasi pada Tahun 2024 didinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah sebesar 105 sedangkan dilevel nasional 101,35 (realisasi Triwulan II). Untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) pada

Level Kabupaten Lebih tinggi dibandingkan pada level nasional, dengan capaian 103.6.

- Pada indikator Nilai Konsumsi Ikan (NKI) realisasi pada tahun 2024 di dinas Perikanan sebesar 59. Pada Level Nasional untuk realisasi tahun 2024 belum dipublish. Namun bila dibandingkan dilevel nasional pada tahun 2023 Nilai konsumsi Ikan Kabupaten lebih tinggi daripada level nasional dengan capaian 103,18

Tabel 3.15
Analisis Keberhasilan, Faktor Penghambat dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Faktor Pendukung dan Penghambat	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan :Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan						
		Nilai Tukar Nelayan Daerah	109,5	126,46	115,49	Faktor Pendukung : 1.Dukungan dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah 2.Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar, 3.Penerapan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan yang baik salah satunya dengan bantuan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan) 4.Adanya Kios Maritim untuk pelayanan kenelayanan 5. Fasilitas pemerintah untuk penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan 6. adanya Pelaksanaan kegiatan Pendampinagn Kenelayanan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan perlindungan nelayan berupa Jaminan sosial bagi nelayan	1. Perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan 2. Peremajaan dan peningkatan teknologi terhadap armada dan alat tangkap yang dimiliki nelayan 3. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap kelompok penerima bantuan/hibah dari pemerintah. 4. Adanya Kios Maritim sebagai tempat Pelayanan untuk memenuhi dokumen usaha dan tertib administrasi lainnya 5. Pelatihan bagi nelayan untuk mengembangkan Kompetensi dan keterampilan nelayan 6. Penguatan kelembagaan berupa pembinaan dan sosialisasi untuk mendorong nelayan membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama) sehingga dipermudah dalam mengakses modal usaha dari



						perbankan skema KUR yang diutamakan bagi nelayan dan bantuan Kredit Tanpa Bunga dari Pemerintah
					7. dibentuknya Forum nelayan sebagai wadah forum komunikasi nelayan dan pemerintah dalam mengakses informasi informasi terbaru terkait kenelayanan	
					Faktor Penghambat : 1. TPI belum bisa menjadi fungsi sebagai Tempat Pemasar Ikan dimana sistem logistik ikan segar masih terbatas pada tengkulak/pengepul	
					2. Masih rendahnya kepatuhan nelayan untuk memenuhi dokumen usaha dan tertib administrasi lainnya	
					3. Tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah, sehingga Pengembangan Kompetensi dan keterampilan Nelayan yang belum maksimal	
					4. Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan	
					5. Ketersediaan es yang masih mengandalkan pasokan dari pangkalpinang sehingga tidak menjangkau daerah terluar	
					Faktor Pendukung : 1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari pemerintah provinsi dan daerah untuk masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah	1. Pelatihan teknologi budidaya perikanan seperti pembuatan pakan dengan bahan baku lokal.
					2. Adanya BBI dan UPR dalam memenuhi ketersediaan Benih	2. Manipulasi lingkungan budidaya ikan dengan menggunakan teknologi sehingga meminimalisir pengaruh cuaca ekstrim.
					3. Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).	3. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap kelompok penerima bantuan/hibah dari pemerintah.
					4. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui Pakan Rakyat yang memproduksi pakan sendiri dengan bahan baku lokal sehingga mampu menekan biaya produksi	4. Penyediaan sentra pemasaran perikanan hasil budidaya ikan air tawar.
						5. Mengembangkan inovasi di bidang perikanan seperti budidaya kepiting bakau (silvofishery), pakan rakyat dan fishcare
					Faktor Penghambat : 1. Untuk komoditi tertentu, Produk hasil perikanan budidaya kita masih belum mampu bersaing dari sisi harga dengan produk hasil perikanan budidaya di luar pulau sehingga ketika terjadi over produksi maka sulit diserap oleh pasar diluar pulau Bangka	6. Mengembangkan sistem produksi dan penerapan teknologi pembudidayaan ikan
					2. Sebagian Besar pembudidaya ikan masih mengandalkan pakan pabrikan, sementara harga pakan pabrikan terus mengalami kenaikan	
					3. Produk hasil perikanan budidaya masih dijual dalam bentuk segar.	
					4. Potensi penyakit dan penurunan kualitas lingkungan perikanan budidaya	
					5. Kompetensi dan keterampilan teknis budidaya ikan belum merata	

						<p>Faktor Pendukung :</p> <p>1. Didukung oleh kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan daerah pesisir sehingga Terjaganya jumlah pasokan ikan dalam jumlah cukup.</p> <p>2. Kebiasaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dalam mengkonsumsi ikan dan gerakan nasional GEMARIKAN yang cukup masif</p> <p>3. Tempat pemasaran produk yang mulai berkembang, seperti galeri, toko oleh-oleh dan supermarket.</p> <p>4. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, baik dari penyuluh perikanan maupun pemerintah melalui dinas teknis.</p> <p>5. Pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal melalui diversifikasi produk olahan ikan dengan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <p>1. Kualitas SDM Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah yang dominan berskala usaha mikro dan kecil sehingga usaha sulit berkembang</p> <p>2. Minimnya sarana peningkatan kapasitas teknis dan non teknis bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan</p>	<p>1. Diversifikasi produk dan komoditas hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya.</p> <p>2. Pendampingan dan pembinaan terhadap pengolah dan pemasar hasil perikanan</p> <p>3. Peningkatan SDM dengan mengadakan Pelatihan bagi Pelaku Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan</p> <p>4. Pembinaan dan sosialisasi GEMARIKAN ke posyandu dan desa-desa pada Tahun 2024</p>
						3. Masih minim nya penerapan teknologi dalam pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
						4. Masih tinggi nya harga jual beberapa komoditas ikan sehingga menjadi pilihan yg cukup sulit dalam mengkonsumsi setiap harinya	
2	Tujuan : Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik						
a.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	95,50	111,05	<p>Faktor Pendukung :</p> <p>1. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk merealisasikan setiap target indikator kinerja utama, indikator program dan indikatoregiatan.</p> <p>2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan untuk menganggarkan program dan kegiatan untuk merealisasikan target kinerja.</p> <p>3. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk komitmen dan konsisten terhadap dokumen perencanaan (renstra dan renja) yang telah ditetapkan</p>	
		Nilai Evaluasi AKIP	80	80,27	100,33		
		Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai	Sesuai	100		

Uraian penjelasan tabel :



NTN Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2024 sebesar 126,46. NTN diatas 100 menggambarkan bahwa pendapatan keluarga nelayan sudah dapat mencukupi biaya melaut dan biaya hidup sehari-hari keluarga mereka. Beberapa faktor yang mendukung antara lain:

1. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar
3. Penerapan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan yang baik salah satunya dengan bantuan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan).
4. Adanya Kios Maritim untuk pelayanan kenelayanan
5. Fasilitasi pemerintah untuk penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi nelayan
6. Adanya Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Kenelayanan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan perlindungan nelayan berupa Jaminan sosial bagi nelayan
7. dibentuknya Forum nelayan sebagai wadah forum komunikasi nelayan dan pemerintah dalam mengakses informasi informasi terbaru terkait kenelayanan

Faktor Penghambat :



1. Masih belum rampung dan belum optimalnya pemanfaatan beberapa fasilitas pokok/ penunjang di TPI
2. Masih rendahnya kepatuhan nelayan untuk memenuhi dokumen usaha dan tertib administrasi lainnya
3. Tingkat pendidikan nelayan yang relatif rendah, sehingga Pengembangan Kompetensi dan keterampilan Nelayan yang belum maksimal
4. Semakin jauhnya daerah penangkapan ikan
5. Ketersediaan es yang masih mengandalkan pasokan dari pangkalpinang sehingga tidak menjangkau daerah terluar

Berdasarkan hasil analisis terhadap Nilai Tukar Pembudidaya Ikan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) secara umum di Kabupaten Bangka Tengah secara total (agregat) pada tahun 2024 sebesar 105 artinya nilai ini masih diatas 100, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan mampu menghasilkan penerimaan yang melebihi biaya produksi/kebutuhan atau pengeluaran rumah tangganya. Beberapa faktor yang mendukung antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari pemerintah provinsi dan daerah untuk masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Adanya BBI dan UPR dalam memenuhi ketersediaan Benih



3. Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
4. Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui Pakan Rakyat yang memproduksi pakan sendiri dengan bahan baku lokal sehingga mampu menekan biaya produksi

Faktor Penghambat :

1. Untuk komoditi tertentu, Produk hasil perikanan budidaya kita masih belum mampu bersaing dari sisi harga dengan produk hasil perikanan budidaya di luar pulau sehingga ketika terjadi over produksi maka sulit diserap oleh pasar diluar pulau Bangka.
2. Sebagian Besar pembudidaya ikan masih mengandalkan pakan pabrikan, sementara harga pakan pabrikan terus mengalami kenaikan
3. Produk hasil perikanan budidaya masih dijual dalam bentuk segar
4. Potensi penyakit dan penurunan kualitas lingkungan perikanan budidaya
5. Kompetensi dan keterampilan teknis budidaya ikan belum merata

Nilai Konsumsi Ikan Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2024, sebesar 59,44 kg/kapita/tahun atau sebesar 4,95 Kg/kapita/Bulan atau sebesar 1,24 kg/kapita/Minggu atau sebesar 0,17 Kg/kapita/hari atau 165 gram/kapita/Hari Beberapa faktor yang mendukung antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan daerah pesisir sehingga Terjaganya jumlah pasokan ikan dalam jumlah cukup



2. Kebiasaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dalam mengkonsumsi ikan.
3. Tempat pemasaran produk yang mulai berkembang, seperti galeri, toko oleh-oleh dan supermarket.
4. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, baik dari penyuluh perikanan maupun pemerintah melalui dinas teknis.
5. Pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal melalui diversifikasi produk olahan ikan dengan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Faktor Penghambat :

1. Kualitas SDM Pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih rendah yang dominan berskala usaha mikro dan kecil sehingga usaha sulit berkembang
2. Minimnya sarana peningkatkan kapasitas teknis dan non teknis bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan
3. Masih minim nya penerapan teknologi dalam pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Masih tinggi nya harga jual beberapa komoditas ikan sehingga menjadi pilihan yg cukup sulit dalam mengkonsumsi setiap harinya

Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Dinas Perikanan Jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP capaian mencapai 100%, Beberapa faktor yang mendukung antara lain:

1. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk merealisasikan setiap



target indikator kinerja utama, indikator program dan indikator kegiatan.

2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan untuk menganggarkan program dan kegiatan untuk merealisasikan target kinerja.
3. Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk komitmen dan konsisten terhadap dokumen perencanaan (renstra dan renja) yang telah ditetapkan

Strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan dalam menghadapi permasalahan dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dengan memfokuskan pembangunan di lokasi sentra perikanan.
2. Peremajaan dan peningkatan teknologi terhadap armada dan alat tangkap yang dimiliki nelayan.
3. Pelatihan teknologi budidaya perikanan seperti pembuatan pakan dengan bahan baku lokal.
4. Manipulasi lingkungan budidaya ikan dengan menggunakan teknologi sehingga meminimalisir pengaruh cuaca ekstrim.
5. Pendampingan dan pembinaan yang intensif terhadap kelompok penerima bantuan/hibah dari pemerintah.
6. Penyediaan sentra pemasaran perikanan hasil budidaya ikan air tawar.



7. Diversifikasi produk dan komoditas hasil perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
8. Inovasi Gerakan Pakan Ikan Mandiri (GERPARI) berbasis bahan baku lokal.

Sinergisitas pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.16

Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunja ng/Tidak Menunja ng
Tujuan :Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan							
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	115,48	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pendapatan Nelayan(Rp/Orang/Bulan)	125,13%	
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Produksi Perikanan Tangkap(Ton)	119,11 %	
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota yang diberdayakan (orang)	100%	
				Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola (TPI)	100%	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan Pembudidaya Ikan yang Diawasi	100%	
				Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	100%	
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	98,17%	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pendapatan Pembudidaya Ikan (rupiah/orang/bulan)	92,86%	
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kelas madya (kelompok)	40%	
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (Ton),	151,67%	
					Jumlah Produksi Benih (Ekor),	2.203,69%	
					Jumlah Produksi Ikan Hias (Ekor)	540,06%	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap dan	100%	



					Pembudidaya Ikan yang Diawasi		
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Pembudidaya Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		
		Nilai Konsumsi Ikan Daerah(NKI D)	106,14 %	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan Segar / Konsumsi Ikan Olahan Hasil Perikanan (kg/kap/tahun)	106,14%	
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha/dokumen perizinan Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang terfasilitasi (dokumen)	100%	
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (orang)	100%	
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota (bulan)	100%	
Tujuan: Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik							
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip	100,33	Program : Penunjang Urusan pemerintah	Indeks Kepuasan masyarakat	111,33	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	100,33	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Dinas Perikanan sesuai dengan SAP	Sesuai	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	

Uraian penjelasan tabel :



- Pada program Pengelolaan perikanan tangkap dengan Indikator Utama Nilai tukar Nelayan (NTN) capaian sebesar 115,48, NTN diatas 100 menggambarkan bahwa pendapatan keluarga nelayan sudah dapat mencukupi biaya melaut dan biaya hidup sehari-hari keluarga mereka. Untuk rata -rata capaian fisik kegiatan pada program pengelolaan perikanan tangkap 100%. Faktor keberhasilan tercapainya target antara lain karena dukungan dan Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat nelayan, kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar, menerapkan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan yang baik salah satunya dengan bantuan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan), yaitu suatu aplikasi penentuan wilayah potensial penangkapan/daerah potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh (Inderaja) yang sudah ada pada pertengahan tahun 2019, dengan adanya tujuan daerah penangkapan ikan yang terarah maka akan meningkatkan produksi hasil nelayan dan menghemat biaya penangkapan dan Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi berbasis teknologi (Atraktor Cumi)dalam dalam pengembangan kapasitas nelayan.



- Pada program pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator kinerja utama Nilai Tukar Pembudidaya Ikan capaian sebesar 98,17 % dan capaian rata-rata kegiatan sebesar 100 %. Faktor keberhasilan tercapainya target antara lain karena komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat pembudidaya ikan., Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) yang memproduksi pakan sendiri dengan bahan baku lokal sehingga mampu menekan biaya produksi. Dengan GERPARI para pembudidaya ikan tidak lagi tergantung dengan pakan ikan pabrikan, sehingga mampu menurunkan biaya pakan ikan sebesar 45-50%, dan Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam sistem pembudidayaan ikan.
- Pada program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator Nilai konsumsi Ikan capaian sebesar 106,14. Dengan rata-rata capaian fisik kegiatan sebesar 100%. Faktor pendorong sehingga tercapainya target antara lain kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan daerah pesisir. Kebiasaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah mengkonsumsi ikan, khususnya ikan air laut. Ketersediaan ikan secara terus-menerus untuk mencukupi

kebutuhan pangan akan ikan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah terbiasa mengolah/ membuat makanan berbahan dasar ikan.

- Pada Program Penunjang Urusan pemerintah dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP dan Laporan keuangan Sesuai SAP capaian sebesar 100 %. Dengan rata-rata vcapaian fisik kegiatan sebesar 100%. Faktor Pendorong tercapainya target adalah Komitmen setiap unit eselon II, III, IV dan staf lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah untuk merealisasikan setiap target indikator kinerja utama, indikator program dan indikator kegiatan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.17

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.236.113.448	4.971.653.164	94,95
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.900.000	17.020.000	95,08
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.383.143.448	4.154.626.900	94,79
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.650.000	3.650.000	100,00
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	1.600.000	21,33



-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.750.000	200.301.612	95,50
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401.518.000	393.505.786	98,00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.652.000	200.948.866	94,50
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.944.345.552	1.479.547.495	76,09
-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	538.671.952	516.903.447	95,96
-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.195.694.000	786.005.576	65,74
-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	209.979.600	176.638.472	84,12
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.504.603.000	3.475.456.008	99,17
-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	194.394.000	191.122.384	98,32
-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.310.209.000	3.284.333.624	99,22
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	7.200.000	6.575.000	91,32
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	7.200.000	6.575.000	91,32
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.144.911.000	2.073.236.986	96,66
-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	295.452.000	281.971.470	95,44
-	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	52.785.000	51.240.146	97,07
-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.796.674.000	1.740.025.370	96,85



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Tujuan:Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan							
2	Sasaran:Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan	109,5	126,46	115,49	1.944.345.552	1.479.547.495	76,09	
		106,95	105	98,18	3.504.603.000	3.475.456.008	99,17	
		56	59,44	106,14	2.144.911.000	2.073.236.986	96,66	
3	Tujuan : Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik							
4	Sasaran :Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	86	95,50	111,05	5.236.113.448	4.971.653.164	94,95	

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

Sasaran 1 : meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 106,60% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.034.815.489,- atau rata-rata 90,64%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pencapaian sasaran 1 menggunakan dana kurang dari yang dianggarkan, berarti terjadi efisiensi dan efektifitas dari anggaran yang disediakan..

Sasaran 2: meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan



publik memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan persentase capaian 111,33% dengan realisasi anggaran Rp 4.971.653.164,- atau 94,95%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pencapaian sasaran 2 menggunakan dana kurang dari yang dianggarkan, berarti terjadi efisiensi dan efektifitas dari anggaran yang disediakan.

Pada tahun anggaran 2024 secara keseluruhan persentase rata-rata capaian kinerja mencapai 108,97% dengan realisasi anggaran Rp 12.006.468.653,- atau 93,53%. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pencapaian sasaran menggunakan dana kurang dari yang dianggarkan, berarti terjadi efisiensi dan efektifitas dari anggaran yang disediakan.

Pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86	95,05	111,05	5.236.113.448	4.971.653.164	94,95	
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	80,27	100,33	17.900.000	17.020.000	95,08	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sesuai	Sesuai	100%	4.383.143.448	4.154.626.900	94,79	
-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	3.650.000	3.650.000	100,00	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	7.500.000	1.600.000	21,33	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	209.750.000	200.301.612	95,50	



-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	401.518.000	393.505.786	98,00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	212.652.000	200.948.866	94,50	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.529.861	8.170.833	125,13	1.944.345.552	1.479.547.495	76,09	
-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	28.518,94	33.969,03	119,11 %	538.671.952	516.903.447	95,96	
-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	400	400	100%	1.195.694.000	786.005.576	65,74	
-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	2	100%	209.979.600	176.638.472	84,12	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.250.000	5.240.858	83,85 %	3.504.603.000	3.475.456.008	99,17	
-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	5	2	40%	194.394.000	191.122.384	98,32	
-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.697,44	2.574,62	151,68%	3.310.209.000	3.284.333.624	99,22	
		15.000.000	330.553.409	2.203,69%				
		75.000	405.050	540,07%				
4	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN	60	60	100%	7.200.000	6.575.000	91,32	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	60	60	100%	7.200.000	6.575.000	91,32	
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				2.144.911.000	2.073.236.986	96,66	
-	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1	1	100%	295.452.000	281.971.470	95,44	
-	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40	40	100%	52.785.000	51.240.146	97,07	



-	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12	12	100%	1.796.674.000	1.740.025.370	96,85	
---	---	----	----	------	---------------	---------------	-------	--

Uraian penjelasan tabel :

- Berdasarkan Tabel diatas pada program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota, Realisasi Fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 94,95.
- Pada program pengelolaan perikanan tangkap rata-rata capaian fisik kegiatan adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 76,09.
- Pada program pengelolaan Perikanan budidaya rata-rata capaian fisik kegiatan adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 99,17%.
- Pada Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan rata – rata capaian fisik kegiatan 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 91,32
- Pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan hasil perikanan rata-rata capaian fisik kegiatan 100 %,sedangkan realisasi anggaran sebesar 96,66%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,97% % (kategori Sangat Tinggi)



- Sasaran Meningkatnya pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 108,97% % (kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 113,33% (kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.837.173.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.006.468.653, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 93,52%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.